

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**CINDY AZIZAH  
NPM 1651010433**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Skripsi ini berjudul "EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa arti kata atau istilah, antara lain:

1. Efektivitas adalah dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan katalain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>1</sup> Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa untuk program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>
2. Penggunaan diartikan sebagai suatu proses cara perbuatan memakai sesuatu atau membeli sesuatu dalam bentuk barang atau jasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.4.

<sup>2</sup> I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol 1 Tahun 2016.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 852.

3. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>
4. Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh suatu negara menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>5</sup>
5. Infrastruktur adalah instrumen untuk memperlancar roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan.<sup>6</sup>
6. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>7</sup>
7. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan qiyas<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul adalah menggambarkan bagaimana target pembangunan yang ingin dicapai Dana Desa di desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan pembangunan yang kemudian ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

---

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Jakarta: Kemenkeu, 2017), h. 7.

<sup>5</sup> Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi Dan strateginya*. (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009). h. 4-5.

<sup>6</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (jakarta, penerbit Erlangga, 2002), h. 3.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Keudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 618.

<sup>8</sup> Lukman Hakim, *Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012), h. 16.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan objektif**

Dana Desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa itu sendiri untuk pembangunan infrastruktur desa, mengatasi kemiskinan dan memajukan perekonomian desa<sup>9</sup>.

Berdasarkan hasil observasi dari masyarakat desa Sukamerindu masyarakat masih belum merasakan secara maksimal manfaat dana desa itu sendiri maka akar dari permasalahan itu peneliti mengangkat judul efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dalam persepektif ekonomi Islam untuk melihat arah alokasi dana desa itu kemana saja ke pembangunan, pemerdayaanj dan lainuya.

### **2. Alasan subjektif**

Penulis optimis dapat menyelesaikan penelitian ini, karena tersedia data dan informasi yang terkait judul yang akan diteliti, baik informasi secara langsung dari institusi yang terkait, perpustakaan serta dari media-media yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup>Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* , (Jakarta: PT Grasido,2010), h.2.

### C. Latar Belakang Masalah

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan dimasa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan perdesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan di desa merupakan modal pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong royong.<sup>10</sup>

Desa Sukamerindu sebelumnya pada Tahun 1935 merupakan salah satu pedukuhan dari Desa Suka Bandung, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Tanggamus) pada Tanggal 24 Agustus 1935 tokoh adat masyarakat mengajukan untuk pemekaran desa dan sepekan diberi nama desa Sukamerindu dengan resmi Bapak Abdul Muin sebagai pejabat Kepala Pekon pertama di desa Sukamerindu.

Desa Sukamerindu merupakan wilayah salah satu dari 20 desa yang ada di kecamatan Talang Padang yang terletak 2 km dari Kecamatan, dan 33 km dari Ibu kota Kabupaten Tanggamus. Desa Sukamerindu mempunyai luas wilayah  $\pm 185$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan desa Tanjung Heran.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Suka Bandung.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan desa Sinar Petir.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Suka Negeri.

---

<sup>10</sup> I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol 1 Tahun 2016.

Setiap desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah yang disebut Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan masyarakat. Menurut masyarakat desa Sukamerindu mereka menuturkan bahwa belum terlihat secara spesifik adanya pembangunan gedung serbaguna dan kurangnya sumur bor untuk masyarakat yang kurang mampu, karena pembangunan sumur bor baru ada di kantor desa. Berbeda dengan desa yang lain yang sudah ada bangunan gedung serbaguna dan sumur bor yang sudah dibangun di titik masyarakat yang kurang mampu. Hal ini membuktikan bahwa masih adanya kesenjangan pembangunan antar desa<sup>11</sup>.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Syahroni selaku Penanggung Jawab Sementara (PJ) beliau menuturkan, *"bahwa pembangunan di desa sudah jalan dengan baik dan didukung oleh faktor pendukung yakni SDM meliputi masyarakat sekitar dan pendanaan, tetapi pengelolaan dana belum optimal, disisi lain ada juga faktor penghambatnya yang masih kurang dalam menunjang efektivitas pembangunan, peran lembaga desa yang belum menunjang kegiatan pembangunan, dan pemahaman yang kurang dari masyarakat tentang regulasi kegiatan pembangunan."*<sup>12</sup>

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga Anggaran Dana Desa dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa, dan pembangunan desa akan meningkat.

---

<sup>11</sup>Memori Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus 2019.

<sup>12</sup>Syahroni, Wawancara Dengan Penulis, Pekon Sukamerindu, Tanggamus 23 Januari 2020.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pertumbuhan desa dan Kabupaten/Kota semakin seimbang. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi menuju kedesentralisasi menyebabkan terbukanya suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing suatu daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi yang dimaksud dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Daerah otonom yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Cakupan wilayah adalah Daerah Kabupaten/Kota akan menjadi cakupan wilayah daerah Provinsi atau Kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>13</sup>

Undang-undang desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi sumber

---

<sup>13</sup>Lubherty Dewi Amelia, Sudati Nur Safiah, Gentur Jalunggono, *Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Grege, Kecamatan Tembaka, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018*. Directory Jornal Of Economic Vol 1 No 1.



kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar diberikan kepada desa untuk pembangunan di desa. Kebijakan Dana Desa ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.<sup>15</sup> Kebijakan ini dimaksud untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokrasi, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan.

Berikut ini data Dana Desa di desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2015-2019:

**Tabel 1.1**  
**Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2015-2019**

No.	Tahun	Nominal (RP)
1	2015	322.944.029
2	2016	703.346.006
3	2017	1.034.981.020
4	2018	1.098.092.100
5	2019	1.187.096.226

*Sumber : Wawancara Bendahara Desa Sukamerindu pada tanggal 23 Januari 2020.*

<sup>14</sup>Kementerian keuangan RI *Buku Saku Dana Desa*..., h. 2.

<sup>15</sup>Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Ahmad Buchari, *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah* . Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM, 6 (1) (2018): 14-24.



Berdasarkan data Dana Desa diatas, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan tentang pengertian desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Menteri Nomor 11 pasal 5 Tahun 2019 menjelaskan tentang penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat<sup>17</sup>.

Adapun pembangunan infrastruktur yang tercapai di desa Sukamerindu dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Pembangunan Infrastruktur**

No	Tahun	Uraian kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	2015	Pembangunan TPA	120.564.300
		Pembangunan Paving Blok	65.250.000
		Pembangunan Talud	83.258.22
		<b>Total</b>	<b>269.072.522</b>
2	2016	Pembangunan Rabat Beton	184.573.250
		Pembangunan Drainase	154.473.767
		Pembangunan Jalan Aspal	212.473.250
		<b>Total</b>	<b>552.522.537</b>
3	2017	Pembangunan drenase	173.075.000
		Pembangunan Paving Blok	165.745.827
		Pembangunan Rabat Beton	186.743.552
		Pembangunan Puskesmas	185.475.432
		<b>Total</b>	<b>711.039.811</b>

<sup>16</sup>Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*...., h.2

<sup>17</sup>KEMEN-DPDTT, *Penggunaan Dana Desa*, (Tahun 2020), h. 8.

4	2018	Pembangunan Drainase	125.742.345
		Pembangunan Jembatan	182.753.147
		Pembangunan Jalan Aspal	175.475.321
		Pembangunan kantor desa	265.875.423
		<b>Total</b>	<b>749.846.235</b>
5	2019	Pembangunan Drainase	243.727.375
		Pembangunan Paving Blok	174.532.765
		Pembangunan Sumur Bor	18.700. 300
		Pembangunan Rehab PAUD	45.631.485
		Pembangunan Rehab PUSKESdes	75.856.400
		Pembangunan Rehab TPA	35.376.500
		Pembangunan Rabat Beton	184.564.700
		Pembangunan Taman Baca	45.631.482
		<b>Total</b>	<b>824.021.011</b>

*Sumber: Wawancara Bendahara Desa Sukamerindu pada tanggal 14 April 2020*

Dari data di atas dapat dilihat pencapaian pembangunan di desa Sukamerindu dari Tahun 2015 sampai 2019. Data setiap tahunnya mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Pengeluaran tertinggi pada tahun 2019 ditahun 2019 terdapat beberapa pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan drenase, paving blog, pembangunan puskesmas pembangunan TPA dan sebagainya.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat.<sup>18</sup>

Salah satu pentingnya penggunaan dalam Islam perlunya diterapkan karena dengan adanya penggunaan kaum muslim bisa mengatur perbelanjaan dengan perhitungan secermat cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan

---

<sup>18</sup>*Ibid.* h.2

keperluan dan kegunaan yang semestinya. Tidak boleh berbelanja yang tidak penting dan tidak ada guna karena akan menyebabkan mubazir. Pemerintah juga harus sebisa mungkin mengelolah dan mempergunakan Dana Desa dengan sebaik mungkin karena itu harta orang banyak yang di peruntukkan untuk kesejahteraan orang banyak. Dalam agama Islam memiliki konsep mempergunakan atau mengelola harta orang banyak dalam kitab suci Al-Qur'an Q.S. *Al-Baqarah*, ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

*Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Berdasarkan Q.S. *Al-Baqarah*, ayat 188 yang menyebutkan janganlah kamu memakan sebagian dari harta benda orang lain itu (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanahan dalam ekonomi masyarakat dan kaum muslim sangat dilarang melakukan satu perlakuan tidak pantas terhadap harta milik orang lain.

Dalam kitab suci Al-Qur'an *At-Taubat* ayat 60 menjelaskan tentang bantuan sejenis zakat, shodaqoh, dll. Harus diberikan untuk orang yang tidak mampu, termasuk juga bantuan dari pemerintah dengan asaskan Islam maka bantuan ini diberikan sebagai ibadah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِيَالرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ سَبِيلٍ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari latar belakang diatas, maka peneliti ini berjudul "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)".

#### **D. Fokus Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada pembangunan infrastruktur desa pada desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa Sukamerindu?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa Sukamerindu?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam perspektif Ekonomi Islam?

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapula yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
- c. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur pada desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan tinjauan Perspektif Ekonomi Islam.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapula manfaat dari penelitian tersebut:

- a. Secara praktis
  - 1) Sebagai pengetahuan bagi penulis sendiri, maupun masyarakat umum tentang program dana desa dan faktor yang mempengaruhi pendukung dan penghambat efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam perspektif Ekonomi Islam pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

- 2) Sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang efektivitas alokasi danan desa bagi pemerintah dan pengawas Dana Desa di kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

b. Secara teoritis

- 1) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian mengenai Anggaran Dana Desa.
- 2) Akademis: penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai tambahan dan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti ini dapat menjadi tambahan wawasan, menambah pengetahuan, dan referensi lain yang berkaitan dengan Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa.

## H. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan salah satu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berfikir reflektif, berfikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan penyelidikan<sup>19</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. *Metode kualitatif* adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan

---

<sup>19</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2013 ), h.24

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>20</sup>. Untuk itu diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

## **1. Jenis dan sifat penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian lapangan yaitu penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya sehingga sumber data dari penelitian lapangan ini adalah sumber data primer<sup>21</sup>. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meminta sumber data dari Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan pelaku, kemudian dianalisis dengan kritis. Adapun analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian yang menggambarkan lebih

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.14.

<sup>21</sup>*Ibid.*



lanjut mengenai efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam sudut pandang ekonomi islam.

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

## **3. Subjek dan objek penelitian**

Adapula subjek dan objek penelitian adalah:

1. Subjek penelitian adalah perangkat desa, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat.
2. Objek dalam penelitian ini adalah "faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam perspektif Ekonomi Islam pada desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus."

## **4. Populasi dan sampel penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Adapula populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Sukamerindu yang berjumlah 547 Kepala Keluarga (KK), Penangung

---

<sup>22</sup>*Ibid.* h.115 .

Jawab sementara (PJ) 1, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>23</sup> Sampel penelitian adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang ciri-ciri atau karakteristiknya benar-benar diselidiki.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling. Proportional random sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari banyaknya jumlah sampel yang tidak sama.

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang berpendapat apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>24</sup> Berdasarkan dari data jumlah populasi adalah 550, saya menggunakan sampel sebanyak 10% dari populasi. Dengan perhitungan sebagai berikut.

Rumus:

$$\begin{aligned} n &= N \times 10\% \\ &= 550 \times 10\% \\ &= 55 \text{ sampel} \end{aligned}$$

Keterangan :

---

<sup>23</sup>*Ibid.* h. 116 .

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, edisi revisi* (Jakarta:Rineke Cipta, 2010), h. 120.

N : Jumlah Populasi

n : Jumlah Sampel

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Suharsimi Arikunto dengan mengambil sampel 10% yang di dapat adalah 55 sampel masyarakat desa Sukamerindu

## 5. Sumber Data

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber data<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung dari masyarakat berbagai latar belakang seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dokumentasi yang sudah tersedia sebagai penunjang data primer<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumentasi, dari buku-buku literatur serta data-data penerimaan dan pengeluaran Dana Desa di Desa Sukamerindu agar menjadi relevan dalam penelitian.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan beberapa setingan, beberapa sumber dan beberapacara. Bila diliat dari cara teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ...*, h. 136.

<sup>26</sup>*Ibid.*

## 1. Metode interview (Wawancara)

Wawancara (interview) adalah salah satu keadaan mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial<sup>27</sup>. Metode interview atau wawancara alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisa pula. Wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan judul peneliti.

Adapun Jenis interview (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu suatu pelaksanaan interview pada saat melaksanakan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen, penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya sudah disiapkan. Sehingga wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan dan pengumpulan data mencatatnya. Interview ini juga ditujukan kepada kepala Desa Sukamerindu atau penanggung jawab sementara (PJ) serta aparat desa lainnya.

## 2. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenalan

---

<sup>27</sup>Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya. Vol 11, No 2 Tahun 2015.

dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala - gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk mengamati objek penelitian dan mendapatkan informasi mengenai aktivitas pelaksanaan penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Sukamerindu.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumen dari seseorang.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tulis atau dokumen resmi tertulis serta foto dengan pihak terkait. Pihak terkait antara lain Kepala Desa atau PJ pekon serta aparat desa.

### 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ada pula metode yang dipakai adalah metode deduksi.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 229.

<sup>29</sup>*Ibid.* h.476.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkai kata-kata yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Dengan metode tersebut akan diuraikan secara umum tentang efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam persepektif ekonomi islam.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu, peneliti harus melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyaji dan data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyaji dan data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan

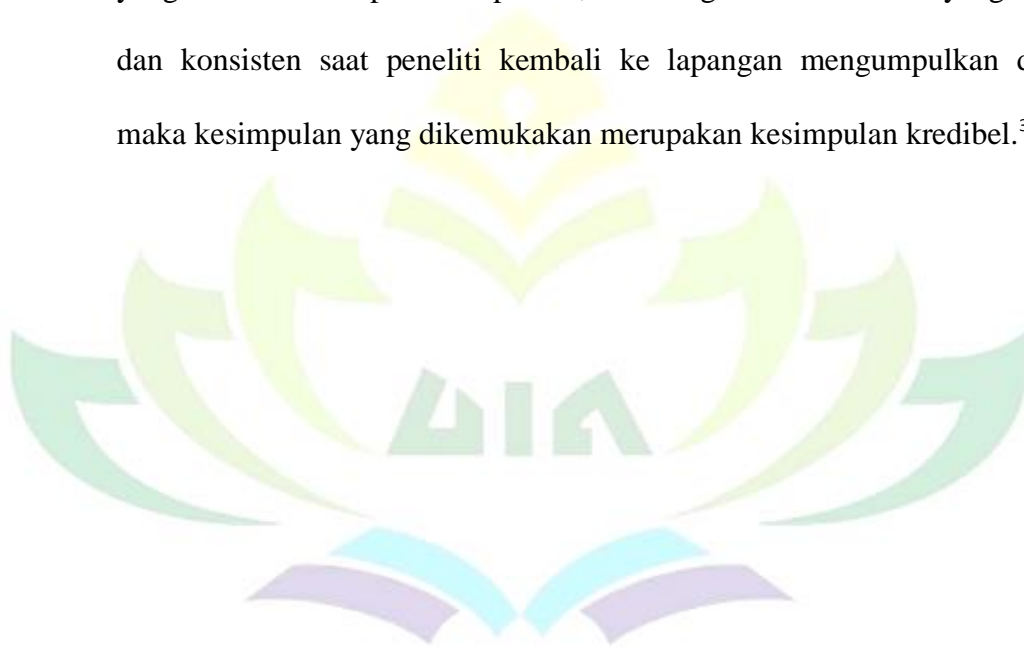
---

<sup>30</sup> Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h.32

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami

c. Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap awal, didukung oleh bukti - bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 405-412.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pembangunan dan Pembangunan Desa

##### 1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan usaha bagi peningkatan mutu kehidupan manusia, sehingga aspek manusia tentu menjadi domain pembangunan. Pembangunan secara metamorfosis ialah perjalanan yang bertolak dari realitas menuju desiderata yaitu tahap demi tahapannya membawa kita semua ke hari esok yang lebih cerah, dengan mutu kehidupan yang lebih meningkat.<sup>32</sup> Berikut ini beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli:

- a. Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
- b. Menurut Kuncoro, pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak di depan mata.

---

<sup>32</sup>Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 14.

- c. Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri Dan Mulyadi Basri, pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan ekonomi.<sup>33</sup>

## 2. Teori-teori pembangunan

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.<sup>34</sup> Teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli:

- a. Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.<sup>35</sup>
- b. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali

---

<sup>33</sup>Nails Dapal, Rony Gosal, Sofia Pangemanan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

<sup>34</sup> Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: BPFEE- YOGYAKARTA, 2002), h. 5.

<sup>35</sup>*Ibid*, h. 23.

pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan. Menurut David Ricardo apabila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi capital terus-menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan di antara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.<sup>36</sup>

- c. Menurut Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan tingkat upah dan di samping itu juga karena

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 24.

pendapatan yang diterima ada yang ditabung dan tidak dikonsumsi semua.<sup>37</sup>

### 3. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembangunan

#### 1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, cepat lambat proses pembangunan tergantung sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan untuk melaksanakan proses pembangunan.

#### 2) Sumber daya alam

Sebagian besar Negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

#### 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan dengan mesin - mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.h.2.*

#### 4) Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur dan ulet. Adapun budaya yang menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros dan KKN.

#### 5) Sumber Daya Modal

Sumber daya modal membutuhkan manusia untuk mengelolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.<sup>38</sup>

#### 4. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan- keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia* ...., h. 25.

<sup>39</sup> Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 59.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun Desa dan Desa membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan 80. Dalam pasal 79 dan 80 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
  - 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
    - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
    - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana
-

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan Desa tidak semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep Desa membangun. Konsep Desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:



- 1) Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
  - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
  - c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
  - d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
  - e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat

Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.<sup>40</sup>

b. Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.<sup>41</sup>

c. Pertanggungjawaban

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 38 ayat 4 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 dan 80.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 100.

Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- 3) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.<sup>42</sup>

## B. Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep Islam tentang pembangunan lebih luas dari pada konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional. Pembangunan Ekonomi Islam bukan hanya pembangunan material, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, Pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.<sup>43</sup> Berikut ini ayat al-quran yang berhubungan dengan pembangunan dalam kitab suci *Al-Qur'an Q.S. al-baqarah*, ayat 60.

وَإِذْ أَسْتَشْفَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ٦٠

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memunculkanlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat (4).

<sup>43</sup> Nurul Huda, dkk, Ekonomi Pembangunan Islam (jakarta : kencana, 2017), h. 20-21.

*mengetahui tempat minumnya (masing-masing). makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.*

Berdasarkan *Q.S. Al-baqarah*, ayat 60 kita dapat mengambil tiga poin penting. *Pertama*, Allah menyuruh Musa memukul batu dengan tongkatnya dan kemudian memancarkan air daripadanya, merupakan petunjuk bahwa kekayaan alam yang ada di bumi merupakan pemberian dari Allah SWT. Yang diturunkan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. *Kedua*, ketika Allah memancarkan dua belas mata air, hal ini merupakan simbolis dari faktor sosial yang mana merupakan salah satu faktor dari semangat pembangunan berkelanjutan dalam mencapai keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan. Kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan seluruh umat manusia, tidak hanya oleh segelintir orang, yang mana kemudian akan menciptakan mudarat bagi umat muslim lainnya. *Ketiga*, merupakan penegasan Allah SWT, kepada manusia setelah diberikan kekayaan alam, kemudian untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dasar-dasar pembangunan ekonomi Islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan dan kenabian.

#### *a. Tauhid*

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa "tidak sesuatu yang layak disembah selain Allah SWT dan tidak ada pemilik langit dan bumi selain Allah SWT". Manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk sementara waktu. Hal ini yang

ditegaskan dalam Al-qur'an tentang ketauhidan mahluk - mahluknya dalam kitab suci Al-Qur'an Q.S. *At-Taubah* ayat 31.

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣١

*Artinya: Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*

#### b. Khalifah

Hakikatnya manusia diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena itu segala aktivitas manusia berhubungan dengan alam (sumber daya) dan manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT. Hal ini yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. *Al-Baqarah* ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

*Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

#### c. Keadilan

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Adil dalam pembangunan yaitu pemerataan pembangunan. Hal ini yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. *Al-Hasyr* Ayat 7 sebagai berikut:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

d. *Nubuwwah* (kenabian)

Dalam pembangunan ekonomi Islam harus diterapkan sifat kenabian antara lain:

- a) *Siddiq* (jujur, benar) sifat ini harus menjadi visi hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada maha pencipta kita, Yang Maha Benar.
- b) *Amana* (tanggung jawab, kepercayaan) sifat ini akan membuat kredibilitas yang tinggi dan sifat tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peran dalam pembangunan.
- c) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) para pelaku harus pintar dan cerdas supaya pembangunan dapat efektif dan efisien dalam pembangunan.
- d) *Tabliq* (komunikasi, keterbukaan) sifat ini merupakan taktik hidup muslim. Karena setiap manusia mengemban tanggung jawab da'wah, yakni menyeru, mengajak, dan memberitahu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (jakarta :PT RAJAGRAFINDA PRASADA, 2016), h. 35 -40

Pandangan ekonomi Islam tentang pembangunan infrastruktur desa terhadap perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus memberikan dampak yang positif, yaitu memberikan *kemaslahatan* bagi masyarakat setempat baik aspek perekonomian maupun aspek sosial. Pembangunan infrastruktur yang dikatakan memberikan *kemaslahatan* apabila masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat yang sebagian petani, para pekerja buruh dan lainnya memang merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dalam melintas untuk bekerja. Ada pula pembangunan drenase untuk mengalirkan resapan air hujan dan limbah warga yang dialirkan ke sungai, pembangunan talud pun sudah dirasakan masyarakat Sukamerindu dengan pembangunan talud air bias mengalir dengan baik sehingga air bias dimanfaatkan petani, dengan dibangunnya talud diharapkan dapat memperlancar mobilisasi masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

### **C. Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuat hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian



tujuan-tujuan.<sup>45</sup> menurut Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).<sup>46</sup> Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan suatu organisasi, sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut.

1. Menurut Harbani Pasolong Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>47</sup>
2. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>48</sup>
3. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, (oprasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaan.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Gramedia, 2007), h.132.

<sup>46</sup> Nasution. *Sosiologi pendidikan*. (Jakarta: Bumi aksara) 1983. Hal.56

<sup>47</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta), h.4.

<sup>48</sup> Martani dan Lubis, *Teori organisasi* (Bandung: Ghailia Indonesia, 2007), h.55.

<sup>49</sup> Mahmudin, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), H.92

## D. Desa

### 1. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *dhesi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga, mayoritas penduduk bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikan cenderung rendah.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian Desa adalah kesatuan daerah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).<sup>50</sup>

## 2. Unsur Desa

### a. Unsur Daerah

Dalam artinya tanah- tanah didesa yang produktif dan yang tidak produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.

### b. Penduduk

Dalam hal ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencarian penduduk setempat.

### c. Tata kehidupan

Dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa.<sup>51</sup>

## 3. Ciri-ciri Desa

Desa memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan kota. Ciri-ciri desa antaranya sebagai berikut:

### a. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan erat dengan alam.

Hal tersebut juga ditegaskan dari letak geografis yang umumnya jauh dari pusat kota.

### b. Mata pencarian masyarakat desa umumnya adalah petani dan secara khusus petani sangat bergantung pada musim.

<sup>50</sup>Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* ,(Jakarta: PT Grasido,2010), h.1-2.

<sup>51</sup>Dilahur, *Geografi Desa Dan Pengertian Desa* . forum geografi No.14 dan 15 Th.VIII.

- c. Ditinjau dari karakteristik masyarakatnya, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
- d. Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencahariaanya dimana struktur perekonomian bersifat agraris.
- e. Hubungan antar masyarakat desa didasari pada ikatan kekeluargaan yang erat.
- f. Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang diutamakan.<sup>52</sup>

#### 4. Potensi Desa

Potensi desa merupakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat, serta tersimpan didesa. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terbagi menjadi dua yaitu:

##### a. Potensi Fisik

Potensi fisik desa merupakan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah:

1. Tanah, merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga desa.
2. Air, digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.
3. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja.
4. Cuaca serta Iklim, memiliki peran penting bagi warga desa.
5. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan

---

<sup>52</sup>Icuk Ranga, Erwin Stiady, *Optimalisasi Potensi Desa Diindonesia* (Jakarta:PT Grasindo, 2019), h.3-4.

#### b. Potensi Nonfisik

Potensi nonfisik yang ada di desa adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat pada desa. Sumber daya yang termasuk nonfisik adalah:

1. Masyarakat desa yang hidup bergotong-royong menjadi kekuatan produksi, serta pembangunan desa.
2. Aparatur desa atau pamong desa yang berkerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintah desa.
3. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.<sup>53</sup>

### E. Pemerintahan Desa

#### a. Pemerintahan dan Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan, memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat 1, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah.<sup>54</sup>

#### b. BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)

Menurut UU No 6 Tahun 2014, Badan Pemusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 8-9.

<sup>54</sup> Syafrie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011), h. 97.

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ketertarikan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c. Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.<sup>55</sup>

d. RKPDesa (Rencana Kerja PemerintahanDesa)

Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi atau Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79 pasal (1) menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Senada dengan pernyataan tersebut ayat (2) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berjangka meliputi :

---

<sup>55</sup> V.Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa* ,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.9.

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6(enam)tahun;
2. Rencana pembangunan Tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka.<sup>56</sup>

e. APB Desa dan Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biyai dengan uang desa. dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaandes.<sup>57</sup>

f. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa tersebut terdiri dari Sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Masing-masing dari perangkat desa tersebut memiliki tugas yang dilaksanakan, antara lain:

1) Sekretaris desa

Sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator

---

<sup>56</sup>Handoko, Hani, *Manajemen*, edisi 2. (Yogyakarta: BPFE, 2003). h.23.

<sup>57</sup> V. Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), H.33.

pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.<sup>58</sup>

## 2) Kepala seksi

Kepala seksi sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi sebagaimana dimaksud memiliki tugas, antara lain:

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab.
- b) Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

---

<sup>58</sup>*Ibid,*



- d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepaladesa.
- f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.

### 3) Bendahara Desa

Bendahara sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 113 tahun 2014 dijabat oleh staf pada bagian keuangan. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetor -kan /membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaanAPBDesa.<sup>59</sup>

## F. Dana Desa

### 1. Pengertian Dana Desa

Pasal 1 angka 2 PP Nomor. 8 Tahun 2016 Dana Desa yakni yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>60</sup>

### 2. Tujuan Dana Desa

Adapula beberapa tujuandana desa adalah:

---

<sup>59</sup>*Ibid*,

<sup>60</sup>M.N Mukmin, S. Maemunah, *Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi*, JURNAL AKUNIDA ISSN 2442-3033 Vol. 4 No. 2 Tahun 2018.

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam pelaksanaan, perencanaan dan pembangunan desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat desa.<sup>61</sup>

### 3. Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota Kepada Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara peminda bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran dengan ketentuan.

Tahap penyaluran dari RKUN Ke RKUD:

1. Tahap 1: 40% pada bulan April.
2. Tahap 2: 40% pada bulan Agustus.
3. Tahap 3: 20% pada bulan November.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

- a. Peraturan Bupati atau Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besar Dana Desa.
- b. APBD kabupaten/ kota telah ditetapkan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Justita Dura, *Pengaruh Akutabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal JIBEKA Vol 10 No 1 Tahun 2016 .

#### 4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat desa.<sup>63</sup>

Prinsip Penggunaan Dana Desa:

1. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak, asas usul dan kewenangan lokal bersekala desa yang di atur dan diurus oleh desa.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

Prioritas Pembangunan Desa:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui:
  - 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
    - a) Pengembangan pos kesehatan.
    - b) Pengelolaan dan pembinaan posyandu.
    - c) Pengelolaan dan pembinaan anak usia dini.
  - 2) Pembangunan Sarana Dan Prasaranan Desa.
    - a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa.

---

<sup>62</sup>Tim Visi Yustisia, *undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa dan peraturan tekad*, (jakarta selatan: visimedi, 2015,h. 20.

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 19.

- b) Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa.
- c) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- d) Pembangunan dan pengelolaan energi baru dan terbarukan.
- e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
- f) Pengembangan sarana dan prasarana desa.

### 3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

- a) Pendirian dan pengembangan BUM Desa.
- b) Pembantuan pupuk dan pakan untuk pertanian.
- c) Pengembangan desa wisata.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan manusia

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- e. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1. Kelompok ekonomi produksi.
  - 2. Kelompok perempuan.
  - 3. Kelompok tani.
  - 4. Kelompok masyarakat miskin.
  - 5. Kelompok pengerajin.

6. Kelompok pemerhatian dan perlindungan anak.

7. Kelompok pemuda.

8. Kelompok lain sesuai kondisi desa.<sup>64</sup>

## 5. Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota ke APB Desa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan adil.<sup>65</sup>

### 1. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban yang mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

---

H.3-6 <sup>64</sup>Marza Twendo, *Kumpulan Perundang-Undangan Diindonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2017)

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 18.

- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>66</sup>

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

### a. Perencanaan

1. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
2. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan Unsur Masyarakat.

### b. Pelaksanaan

1. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
2. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.

---

<sup>66</sup>Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku ....*, h. 26.

3. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Bupati/Walikota.
4. Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Bupati/Walikota.
5. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kepala Desa

c. Penatausahaan

1. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara desa.
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
5. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan Perdes.
3. Laporan format laporan: pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan.

APBDesa T.A berkenaan, kekayaan milik desa per 31 Desember T.A berkenaan dan program pemerintahan dan Pemda yang masuk ke desa.<sup>67</sup>

## 6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengalokasian dana desa, penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa. sementara itu pemantauan dan evaluasi, masing-masing dilakukan terhadap hal-hal berikut ini:

Pemantau:

- a) Penerbitan peraturan Bupati/Wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran desa.
- b) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas desa.
- c) Penyampaian laporan realisasi.
- d) Sisi lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan desa.

Evaluasi:

- a) Penghitungan pembagian besar Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota.<sup>68</sup>

## 7. Undang-Undang Tentang Dana Desa

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 19 Ayat 1 Dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk

---

<sup>67</sup>*Ibid*, h.27.

<sup>68</sup>*Ibid*. h. 23



membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat.

- b. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- 3) Pengembangan potensi ekonomi local
- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan Negara berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik pemerintah pusat dan daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna tercapinya penggunaan. Sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB IX pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup

masyarakat setempat baik dalam bidang, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.<sup>69</sup>

#### 8. Ukuran Efektivitas Dana Desa

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan nilai riil. Efektivitas yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Alokasi Dana Desa adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasiADD}}{\text{TargetADD}} \times 100$$

Efektivitas organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai 100%.Tapi alangkah lebih baik lagi bila mampu memperoleh lebih besar lagi.<sup>70</sup>

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagaiberikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan antara 90% -100% berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan 80% -90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil perbandingan 60% -80% berarti kurang efektif.

---

<sup>69</sup> Edwin Kambey, *Efektivitas Penggunaan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Karegesan Kecematankaurtidan Kabupaten Minahasa Utara*. Mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

<sup>70</sup>I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014*.Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol 1 Tahun 2016.

- e. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif.<sup>71</sup>

## **G. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini penulis juga mengambil beberapa referensi dari penelitian sebelumnya sebagai gambaran untuk membantu memudahkan melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti memfokuskan pada Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya :

I wayan saputra, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamaia, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014". Hasil penelitiannya adalah efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamaia, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90% - 100% (efektif). Adapun hambatan yang dialami pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa pada desa lembean, kecamatan kintamania, kabupaten bangi yaitu pemahaman masyarakat terhadap ADD, terjadinya miss komunikasi antara unit kerja baik dalam intra pemerintahan desa, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan stakeholders dan pencairan ADD yang tidak tepat. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa dapat dilakukan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masyarakat dan

---

<sup>71</sup>Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

aparatur desa, meningkatkan koordinasi antra unit kerja, dan membuat dana anggaran untuk dana cadangan program.<sup>72</sup>

Lubherty Dewi Amelia, Sudati Nur Safiah, Gentur Jalunggono, "Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Greges, Kecamatan Tembaka, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018". Hasilnya adalah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari asil uji efektivitas pencapaian antara target dan realisasi belanja desa. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 690-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan , tingkat pencapaian kinerja keuangan pada tahun 2015-2018 , menunjukkan hasil yang efektif untuk program pembangunan dan hasil yang tidak efektif untuk program pemberdayaan masyarakat. Hambatan atau kekurangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa adalah kurangnya atau rendahnya SDM dari perangkat Desa maupun masyarakat desa tersebut serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Dana Desa sehingga pelaksanaan Dana Desa kurang optimal<sup>73</sup>.

Tengku rajib huda "Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Kelurahan (PPIDK) Khusus Desa Kuala Paduka Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014". Hasil penelitian adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa dengan semenisasi baru terpenuhi

---

<sup>72</sup>I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 1 Tahun 2016.

<sup>73</sup>*Ibid*, h. 2-3

mencapai 970 meter atau 33,74% dari seluruh panjang jalan desa 2.875 meter. Kekurangan sepanjang 1.095 meter untuk dilaksanakan semenisasi jalan, hal ini belum memenuhi asas pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu melanjutkan program PPIDK untuk memenuhi asas pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan serta mengurangi rasa kecemburuan sosial bagi masyarakat desa.<sup>74</sup>

La Sumiyanto “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi”. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan ADD dan DD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Hal ini dilihat masih banyaknya anggaran yang belum terserap dalam pembangunan fisik sehingga anggaran tiap tahun masih banyak sisa penganggarannya. Desa kampo-kampo sebagai penerima dana ADD dan DD bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk pembangunan prasarana desa.<sup>75</sup>

Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK. “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso”. Hasil penelitiannya adalah tahap pelaksanaan dan perencanaan keuangan desa, menunjukkan bahwa proses

---

<sup>74</sup>Tengku Rajib Huda, *Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Kelurahan (PPIDK) Khusus Desa Kuala Paduka Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014*. JOM FSIP Vol. 3 No. 2

<sup>75</sup>La Sumiyanto, *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Studi Pemerintahan. Vol 3 No. 2

perencanaan secara terbuka melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk musrenbangdesa. Sedangkan pada tahap pelaksanaan desa, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami tentang keuangan desa, berserta aturan yang terkait.<sup>76</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melihat bagaimana efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas di desa Sukamerindu Kabupaten Talang Padang Kecamatan Tanggamus. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qu'an dan Hadist. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Sukameindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

#### **H. Kerangka pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>77</sup> Dasar Pemikiran yang melandasi penelitian yaitu bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Perspektif Ekonomi Islam pada Pekon Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Karena di Desa Sukamerindu terdapat beberapa permasalahan salah satunya tertinggalnya pembangunan di Desa Sukamreindu dengan Desa lain dan mengakibatkan

---

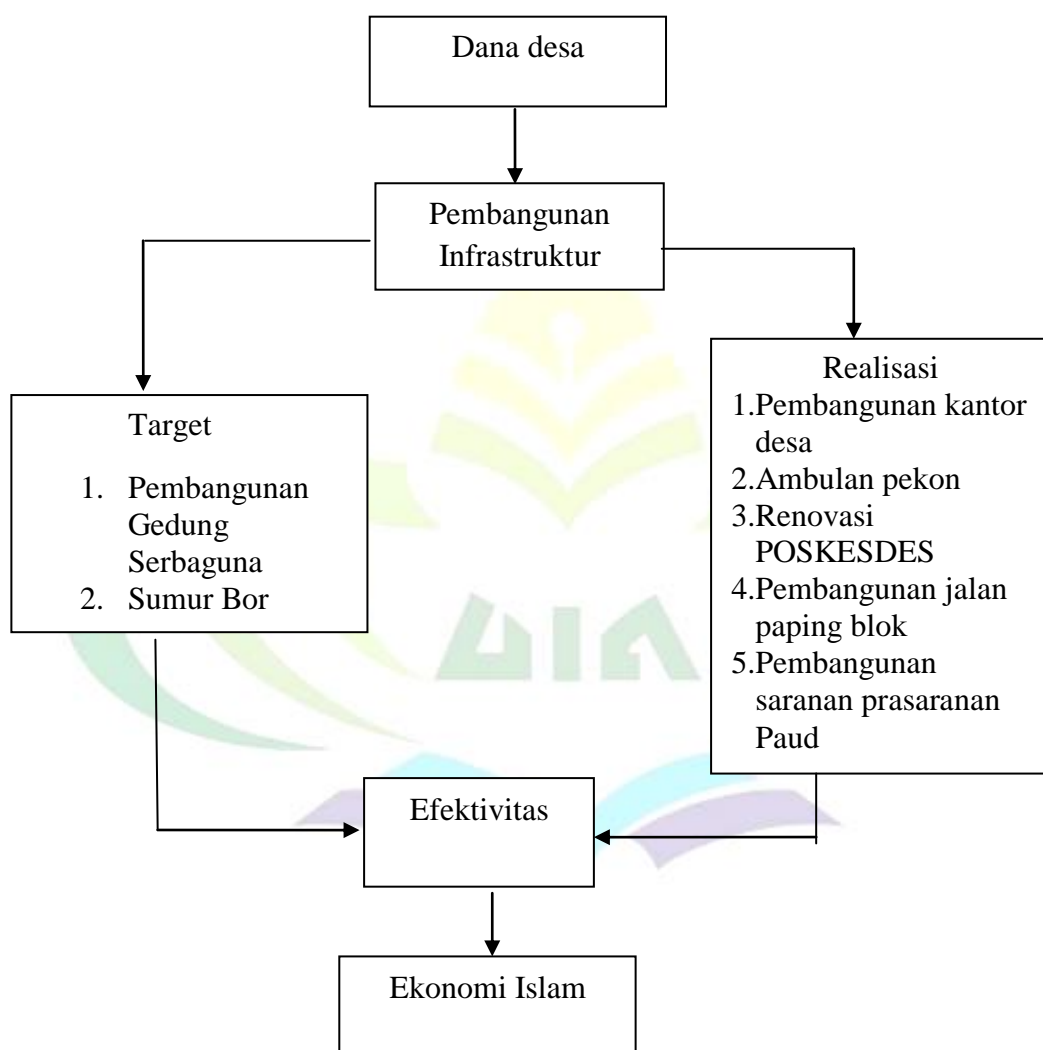
<sup>76</sup>Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK., *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemebrdayan Masyarakat Desa Dikabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB). Vol. 4 No.1:9-20

<sup>77</sup>Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: ALABETA, 2015), h. 283.

kesenjangan pembangunan. Kemudian dalam masalah ini akan dianalisis dalam konsep Ekonomi Islam.

Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan maka penulis menggambarkan suatu kerangka berfikir pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1.1.**  
**Kerangka pemikiran**





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (jakarta :PT RAJAGRAFINDA PRASADA, 2016)
- Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)* (Jakarta: Gramedia,2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Dokumen Desa Sukamerindu
- Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* , (Jakarta: PT Grasido, 2010)
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*,(jakarta, penerbit Erlangga, 2002)
- Handoko,Hani, *Manajemen, edisi 2.* (Yogyakarta:BPFE,2003)
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi publik* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Icuk Ranga, Erwin Stiady, *Optimalisasi Potensi Desa DiIndonesia* (Jakarta:PT Grasindo, 2019)
- Irawan, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: BPFEE-YOGYAKARTA, 2002)
- Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Jakarta: Kemenkeu, 2017)
- KEMEN-DPDTT, *Penggunaan Dana Desa*, (Tahun 2020)
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Lukman Hakim, *Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam* , (Surakarta : Erlangga, 2012)

- Mahmudin, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005)
- Martani dan lubis, *Teori organisasi* (Bandung: Ghailia Indonesia, 2007)
- Marza Twendo, *Kumpulan Perundang-Undagan Diindonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2017)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2013 )
- Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001)
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi Dan strateginya*. (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung:Alfabeta, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, edisi revisi* (Jakarta:Rineke Cipta, 2010)
- Syafrie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011)
- Tim Visi Yustisia, *undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa dan peraturan tekad*, (Jakarta Selatan: visimedi, 2015)
- Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta Selatan: visimedi, 2016)
- V.Sujarweni Wiratna, *Akuntansi Desa* ,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

## JURNAL

- Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK.,*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemebrdayan Masyarakat Desa Dikabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB). Vol. 4 No.1:9-20
- Dilahir, *Geografi Desa Dan Pengertian Desa* . forum geografi No.14 dan 15 Th.VIII

I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol 1 Tahun 2016.

Justita Dura, *Pengaruh Akutabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal JIBEKA Vol 10 No 1 Tahun 2016

La Sumiyanto, *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecaamatan Binongko Kabupaten Wakatobi..Jurnal Studi Pemerintahan*. Vol 3 No. 2

Lubherty Dewi Amelia, Sudati Nur Safiah, Gentur Jalunggono, *Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Greges, Kecamatan Tembaka, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018*. Directory Jornal Of Economic Vol 1 No 1.

M.N Mukmin, S. Maemunah, *Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi*, JURNAL AKUNIDA ISSN 2442-3033 Vol. 4 No. 2 Tahun 2018.

Mita Rosaliza, Wawancara, *Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya. Vol 11, No 2 Tahun 2015.

Nails Dapal, Rony Gosal, Sofia Pangemanan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* .Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Tengku Rajib Huda, *Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Kelurahan (PPIDK) Khusus Desa Kuala Paduka Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014*.JOM FSIP Vol. 3 No. 2

Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Ahmad Buchari, *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah* . Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM, 6 (1) (2018): 14-24

#### WAWANCARA

Asiah, Wawancara Dengan Penulis, Desa Sukamerindu, 10 Oktober 2020

Nano Sumarno, Wawancara Dengan Penulis, Desa Sukamerindu, 10 Oktober 2020.

Sahirdani, Wawancara Dengan Penulis, Desa Sukamerindu, 10 Oktober  
2020.

Zahralia, Wawancara Dengan Penulis, Desa Sukamerindu, 10 Oktober 2020.

